

Lahan Gambut Kian Kritis

Kondisi lahan gambut di Sumatera Selatan (Sumsel), kini kian kritis. Dari 1.374.556,198 hektar, luas lahan di Sumsel 84,7 persennya dalam kondisi kritis. Dari luas keseluruhan lahan gambut tersebut, 40 persennya memiliki riwayat pernah terbakar.

PEMERINTAH, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk mengembalikan fungsi lahan gambut. Untuk itu dibutuhkan strategi pengelolaan rawa terpadu dan berkelanjutan baik itu untuk pertanian, kehutanan dan perkebunan. Selain itu pembenahan harus melibatkan multi disiplin ilmu lintas sektor. Hal ini dikemukakan ketika berlangsungnya *workshop* dengan tema strategi pembentukan

kelembagaan lahan gambut di Sumsel, Selasa 30 Maret yang lalu di Palembang.

Rusakanya lahan gambut di Sumsel itu menurut Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Ahmad Najib, disebabkan oleh beberapa hal misalnya penebangan liar, konversi lahan gambut, kebakaran, serta pembukaan parit dan saluran. "Sulit diprediksi tetapi yang

jelas kerusakan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lahan gambut bagi kehidupan," kata Ahmad Najib.

Najib mengatakan pemanfaatan lahan gambut telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam kepres tersebut, ditegaskannya larangan pemanfaatan lahan gambut dengan kedalaman di atas tiga meter. Kepres tersebut juga menyebutkan, kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penghambat air dan pencegah banjir serta longsor.

"Gambut bersifat seperti busa



Alih fungsi lahan gambut dikawasan desa Gasino Banyuasin.

karena mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari bobot nya, dengan begitu lahan gambut dapat menyerap kelebihan air di musim penghujan. Sehingga dapat mencegah banjir dan melepaskan kandungan airnya secara perlahan di musim kemarau,” kata beliau.

Mengingat lahan gambut memiliki arti penting, karena merupakan sistem penyangga kehidupan, pengatur tata air, sumber pangan, sumber keanekaragaman hayati (plasma nutfah), sumber hasil hutan berkelanjutan, sumber pengembangan budidaya, wisata, dan stabilisasi iklim, serta sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Maka diperlukan suatu kesepakatan antar berbagai pihak dan stakeholder yang terkait.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak 2012 lalu, Balai Pengelolaan DAS Musi bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel telah menginisiasi pembentukan wadah atau

forum lahan gambut Sumsel, dengan melibatkan berbagai pihak terkait pengelolaan lahan gambut.

“Wadah atau forum lahan gambut Sumsel ini, sesuai dengan amanat SK Mendagri No 520-01/Kep/Bangda/2006 tentang kelompok kerja (Pokja) Pengelolaan Lahan Gambut secara berkelanjutan. Serta, surat Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan No.S.280/RHL-4/2012 perihal Pembentukan dan Fungsi Pokja Revitalisasi Lahan Gambut.”

Sementara itu, pengamat lingkungan dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Robiyanto H Susanto menjelaskan mengembalikan fungsi lahan gambut dibutuhkan strategi pengelolaan rawa terpadu dan berkelanjutan baik itu untuk pertanian, kehutanan dan perkebunan. Selain itu pembenahan harus melibatkan multi disiplin ilmu lintas sektor. Dikarenakan, pengelolaan muka air tanah

merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan rawa untuk pembangunan berkelanjutan. “Pentingnya pengelolaan daerah rawa gambut, melalui optimalisasi lahan dan air melalui pengembangan dan pengelolaan lahan rawa secara terpadu, harus dilakukan secara seksama dan bertahap,” ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan rawa atau gambut terpadu berbasis kawasan secara berkelanjutan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi yang ada di masing-masing lokasi.

“Keterpaduan ini hendaknya bersifat vertikal dan horizontal yang menjalankan keberlanjutan program, serta pendekatan kawasan dalam pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan gambut, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menangani hidrologi gambut.”

(feb)



Lahan gambut disepanjang jalan poros menuju pelabuhan Tanjung Api-api

FOTO: REZA